

# Keharmonisan Antara Dialog Dan Dakwah (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama).

**Syamsudhuha Saleh**

Guru Besar Prodi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan  
Politik UIN Alauddin Makassar

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas Ilmu Perbandingan Agama sebagai sebuah gerakan pengetahuan untuk mengatasi ketegangan antara dialog dan dakwah. Dalam hal ini Ilmu perbandingan agama diasumsikan sebagai sebuah jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai keharmonisan, tanpa perlu menghapus salah satu di antara dua hal penting dalam gerakan sosial keagamaan yakni dialog dan dakwah. Selama ini, semangat demokrasi sebagai basis legitimasi untuk berdirinya negara Indonesia telah membuka tabir-tabir disharmoni dalam beragam bentuknya, terutama dalam dialog dan dakwah pada ranah pluralistas etnis, agama dan budaya. Dan pada ranah yang paling ekstrim, jika tidak segera ditangani dengan arif dan bijaksana maka disharmonisasi sosial tersebut selanjutnya akan sangat mungkin menciptakan benih-benih disintegrasi bangsa.

**Kata Kunci : Ilmu, Perbandingan Agama, Konflik, Dialog dan Dakwah**

## **Pengantar**

Belakangan ini berkembang suatu suasana yang baik dalam usaha menumbuhkan hubungan antar agama yang lebih harmonis di Indonesia. Banyak tulisan yang di hasilkan untuk itu, dari yang bersifat empiris maupun normatif. Dalam tulisan ini ditawarkan suatu perspektif ilmu perbandingan agama dalam dialog dakwah dan antar agama. Diantaranya diusulkan perlunya terus menumbuhkan aspek relijiusitas dari setiap agama, salah satu di antaranya adalah menyuburkan ilmu Perbandingan agama, agar dapat memahami agama-agama orang lain untuk mencapai hal ini, perlu kejujuran intelektual. Lewat pintu etika seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh spiritualitas keberagamaan, bukan hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama. Tuntutan spiritualitas keberagamaan yang sejuk dan berwajah ramah jauh lebih dibutuhkan manusia modern yang dihempas gelombang-gelombang besar konsumerisme- materialisme.

Ilmu Perbandingan Agama akan selalu berada dalam gerak ketegangan antara dialog dan dakwah. Dengan menyadari hal ini maka keharmonisan

dapat dibangun secara kreatif, tanpa perlu menghapus salah satu dari dua arah ( dialog dan dakwah). Karena itu pembinaan terhadap kerukunan hidup “ Enam Agama dalam satu rumah” akan tetap terjaga.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk secara etnis, bahasa, budaya dan agama. Khusus menyangkut aspek agama, di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai macam agama yang di akui keberadaannya secara sah oleh pemerintah dan dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.<sup>1</sup>

Dengan adanya kemajemukan agama ini, hubungan harmonis antarumat yang berbeda-beda ini sangat penting untuk dilestarikan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat demokrasi sebagai basis legitimasi bagi tetap berdirinya negara Indonesia telah membuka tabir-tabir disharmoni dalam beragama bentuknya lebih sering terjadi dalam nuansa pluralistas etnis, agama dan budaya. Pada ranah yang paling ekstrim, konflik sosial selanjutnya lebih banyak dimaknai sebagai benih-benih disintegrasi bangsa.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa umat beragama di Indonesia berdasarkan data biro statistik tahun 2005, terdiri dari penduduk beragama Islam sebesar 88,10%, Kristen 6, 11%, Katolik 3,18%, Hindu 1,79%, Buddha 0,61%, Kong hucu 0,10% dan beragama lainnya di bawah 0, 11%. Sehubungan dengan itu Indonesia sesungguhnya memiliki khasanah harmoni sosial yang hingga kini masih mampu menopang kehidupan bangsa. Salah satunya adalah harmoni yang bersumber dari pluralistik etnis agama dan budaya. Adanya klaim kebenaran ( truth claim) dan watak misionaris dari setiap agama, peluang bagi terjadinya benturan dan kesalahpengertian antar penganut agama terbuka lebar. Hal ini jelas mengakibatkan retaknya hubungan antar umat beragama.

Disinilah pentingnya hak setiap orang untuk mengamalkan keyakinannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Dialog antar agama adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama yang bertujuan mencapai kebenaran dan kerja sama dalam berbagai masalah-masalah yang dihadapi bersama. Dalam konteks dialog antar umat beragama ini, peran Ilmu Perbandingan Agama tak bisa di abaikan. Sebab melalui disiplin ilmu inilah dialog antar agama dapat terhindar dari jebakan saling menyalahkan. Selain itu, hanya melalui Ilmu Perbandingan Agama inilah dapat diharapkan terjadinya dialog yang kreatif sehingga tercipta keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Dimensi keharmonisan hidup beragama yang tercakup dalam nilai-nilai agama yang intinya mengajarkan kepedulian

---

<sup>1</sup>Penetapan Presiden no.1/ 1965. Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 229 Ayat 2, dan Undang-Undang Dasar 1945, Bab X,A Tentang Hak-Hak Asasi manusia yang berbunyi “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih, pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Bandingkan dengan Ketetapan Komisi Khusus Departemen Agama RI, no. 40/ 1959, dan kemudian menjadi Undang-Undang no. 5. Tahun 1965.

<sup>2</sup>Abdullah Idi & Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Tiara Wacana, Jogyakarta, 2006, hal. 113.

yang penuh kearifan kepada manusia. Ini yang sering disebut oleh pakar keagamaan seperti Nurkholis Madjid sebagai “*kalimatun sawaa*”. Ajaran seperti ini terdapat dalam setiap agama.<sup>3</sup>

### Sejarah Perbandingan Agama.

Ilmu Perbandingan Agama sudah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1950 an. Pada saat itu mata pelajaran “ perbandingan agama” di ajarkan di beberapa perguruan swasta, seperti *Cursus Noormal Putridan Tsanawiah* di Bukit Tinggi, *Islamic Collegedi* Padang. Mata pelajaran ini di ajarkan oleh Mokhtar Luthfi dan Ilyas Ya’kub, keduanya pernah belajar di Cairo, Mesir.

Selain itu berbagai sekolah Islam swasta lainnya seperti *al Jami’ah al Islamiyah* di Batusangkar, dan *Training College* di Payakumbuh juga mencantumkan mata pelajaran ini, dengan tenaga pengajar utama Mahmud Yunus. Sedangkan buku pegangan yang dipakai adalah *al- Adyan* karangan Mahmud Yunus sendiri.

Pada tahun 1951 pesantren Persatuan Islam ( Persis) di Jawa Timur mengembangkan satu mata pelajaran yang bernama “ Mengenal Agama-agama lain”. Selanjutnya pada tahun yang sama, Perguruan Tinggi Islam Jakarta ( PTID) juga memasukkan mata kuliah yang diberi nama “ Lain-lain Agama dan Kepercayaan”. Selain itu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ( PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama ( ADIA) di Jakarta, masing-masing juga memasukkan mata kuliah “ Perbandingan Agama”.

Sejak itulah Ilmu Perbandingan Agama mulai di kenal dan berkembang di kalangan Islam. Bahkan hampir semua sekolah Islam swasta mencantumkan mata pelajaran “ Perbandingan Agama” tentu saja dengan berbagai variasi nama yang berbeda seperti yang disebutkan diatas.

Pada tahun 1960 setelah PTAIN dan ADIA lebur menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Perbandingan Agama tetap di ajarkan, dengan Prof. Dr. Ahmad Syalabi dan Prof. Mahmud Yunus sebagai tenaga pengajar.

Rintisan kedua orang itu kemudian dilanjutkan oleh A. Mukti Ali, seorang lulusan Universitas Mc. Gill, Canada. Bahkan pada masa A. Mukti Ali Perbandingan Agama menjadi jurusan tersendiri dibawah fakultas Ushuluddin. Hingga sekarang Jurusan Perbandingan Agama telah menghasilkan sejumlah lulusan yang ahli dalam bidang ilmu ini.

### Ilmu Perbandingan Agama dan Dialog.

Salah satu tujuan Ilmu perbandingan Agama, mengutip Joachim Wach dalam bukunya *The Comparative Studi of Religions* ( 1958), adalah memahami agama-agama lain. Untuk mencapai tujuan itu, seorang ahli perbandingan

<sup>3</sup>Ahmad Gaus Af, *Api Islam; Nurkholis Madjid, jalan Hidup Seorang Visioner*, ( Jakarta, 2010, Kompas). Hal. 227.

agama membutuhkan sejumlah kelengkapan, yaitu kelengkapan intelektual, kondisi emosional, dan terakhir kelengkapan pengalaman. Selanjutnya Wach juga menekankan pentingnya metodologi yang dipergunakan dalam studi agama-agama, tampaknya mengabaikan manfaat pendekatan-pendekatan yang telah ada, Wach menganjurkan agar mempergunakan metode fenomenologi agama.<sup>4</sup>

Bertolak dari pandangan Wach diatas, ilmu perbandingan agama di Indonesia, setidak-tidaknya dapat ditelusuri perkembangannya melalui tiga periode;

*Priode pertama* adalah generasi sebelum era A. Mukti Ali, seperti Ilyas Ya'kub, Prof. Dr. Ahmad Syalaby, dan Prof. Mahmud Yunus. Pemahaman mereka terhadap Perbandingan agama boleh dikatakan masih sangat terbatas. Perbandingan Agama dipahami hanya sebagai alat dakwah dan mengajarkan agama-agama lain adalah untuk kepentingan pembuktian keunggulan agama Islam, demikian juga halnya dengan buku-buku yang ditulis. Saat itu Perbandingan Agama sebagai ilmu yang mempunyai metode, sistem, sejarah dan obyek pembahasan sendiri tampaknya belum dikenal.

Dengan pendekatan seperti itu, kecenderungan mengadakan perbandingan antara azas terunggul yang dimilikinya dengan azas terlemah dari agama lain tak dapat dihindari. Oleh karena itu generasi pertama ini dapat dikategorikan dalam kelompok apologetik. Bahkan menurut Kautzar Azhari Noer, MA staf pengajar Perbandingan Agama IAIN Jakarta, bisa disebut sebagai propagandis. Implikasinya, dialog yang berkembang pada era ini terjadi pada tataran teologis dan mereka cenderung saling menyalahkan, saling menuduh dan saling mengecam. Masing-masing agama mengklaim bahwa dirinyalah yang paling benar dan berusaha mengajak penganut agama lain agar mengkonversikan keyakinannya. Sehingga dialog yang berlangsung pun tidak profesional. Meskipun demikian, apa yang telah disumbangkan oleh mereka bukan tak ada artinya.

*Periode kedua* adalah generasi A. Mukti Ali. Buku karangan A. Mukti Ali *Ilmu Perbandingan Agama, Sebuah Pembahasan Tentang Metodos dan Sistema* (1965). Dapat dijadikan sebagai momentum berkembangnya orientasi baru dalam dialog antar agama. Mukti Ali menguraikan sejarah pertumbuhan Ilmu Perbandingan Agama, Metodologi Studi Agama-agama, masalah Orientalisme dan Oksidentalisme, serta manfaat Ilmu Perbandingan Agama, sejak saat ini Perbandingan Agama sebagai Ilmu mulai dikenal dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Selain itu pada priode ini juga mulai dikenal sejumlah metode dan pendekatan dalam studi agama-agama. Dikenalnya sejumlah pendekatan dan metode dalam studi agama-agama itu tentu saja membawahkan

---

<sup>4</sup>Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama, Inti dan bentuk Pengalaman Keagamaan*, Disunting dan dihantar Joseph Kitagawa, hal.3.

implikasi positif bagi keberlangsungan dialog antar agama di Indonesia. Dialog yang berlangsung pada periode ini tidak lagi berisi salah pengertian dan kecaman antara penganut beragama tetapi justru menumbuhkan upaya saling pengertian dan menggalang toleransi antar umat beragama. Apalagi dengan semakin populernya pendekatan *histories Fenomenologis*, kesadaran akan pentingnya prinsip *agree in disagreement* semakin menguat.

A. Mukti Ali sendiri dalam seminar “Peringatan Seperempat Abad Perbandingan Agama di IAIN” (1988) menegaskan bahwa Ilmu perbandingan Agama akan membantu lancarnya dialog antar umat beragama di Indonesia. Tak heran jika dalam periode ini masalah kerukunan antar umat beragama, dan upaya saling memahami betul-betul diperhatikan.

Sebagai seorang intelektual muslim yang moderat, Mukti Ali dianggap sebagai salah satu Menteri Agama yang menempati posisi khusus dalam sejarah kebijakan pemerintah Orde Baru bidang keagamaan. Peranan Mukti Ali bisa dilihat dari berbagai pendekatan kepada para tokoh keagamaan, kepada para Ulama dan politisi Muslim, ia meyakinkan adanya iktikad baik Pemerintah Orde Baru untuk membina kehidupan umat beragama. Karena itu pemerintah merumuskan prinsip-prinsip operasional bagi pembangunan agama, yang diperuntukkan kepada semua komunitas beragama di Indonesia, dalam rangka melindungi, membantu, mendukung dan membina semua bentuk kegiatan keagamaan.<sup>5</sup>

*Periode ketiga* adalah era dimana dialog antar umat beragama diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama oleh berbagai penganut agama. Meminjam istilah Mudji Sutrisno era ini dapat dikatakan sebagai periode “Dialog Antar Agama dalam Pigura Humanisasi”. Maksudnya, dialog dalam periode ini berisi pembicaraan mengenai tema-tema sentral problem kemanusiaan universal, seperti kemiskinan, keterbelakangan, kependudukan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, bahkan masalah buruh. Model seperti ini berkembang dikalangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dilandasi oleh kesadaran manusia bahwa tantangan yang dihadapi oleh agama adalah tantangan yang dihadapi pula oleh manusia. Berarti jika agama berurusan dengan pengertian dakwah dan perbaikan nasib manusia dalam segala aspeknya, maka hal yang sama juga ingin dicapai oleh manusia lepas dari apakah ia beragama ataupun tidak sesuai tujuan yang hendak dicapai yaitu “keselamatan” penganutnya bagi setiap agama.

Dalam konteks ini maka pengertian dakwah dan misi harus di defenisikan kembali. Bukan lagi berbentuk upaya untuk mengajak penganut

<sup>5</sup>Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik ( Jakarta. Indonesian Nederland Cooperation in Islamic Studies ( INIS), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat ( PPIM), Badan litbang Agama Departemen Agama RI, 1998, h.299.

agama lain agar mengkonversikan keyakinannya, tapi justru mengambil bentuk yang mengarah kepada perbaikan kualitas hidup manusia.

Jika dakwah dan misi difahami dalam pengertian pertama, tidak mustahil ia akan menjadi ganjalan serius, dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi bersama, tetapi pada tingkat dialog itu sendiri.

Dengan berkembangnya pendekatan interdisipliner atau lintas ilmu dalam studi-studi ilmu mengenai realitas sosial, semakin disadari urgensinya pendekatan ini, dalam studi agama-agama. Berkaitan dengan pendekatan model dialog yang berkembang pada periode ini, pendekatan interdisipliner kiranya layak dipertimbangkan.

M.Sastrapratedja dalam Seminar “ Peta Wilayah Kajian Ilmu Perbandingan Agama dan Peranannya dalam Pembinaan Kerukunan “ di IAIN Bandung (1988) mendapat perhatian. Dalam Seminar ini, M. Sastrapratedja mengusulkan agar dikembangkan metodologi Studi Agama-Agama yang khas Indonesia, mengingat kompleksitas fenomena agama di Indonesia; kaitan agama dengan budaya masyarakat, interaksi antar agama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia dan interaksi agama dalam kehidupan sosial politik.<sup>6</sup>Kaitan agama dengan budaya masyarakat, Bahrul Hayat mengemukakan kebijakan dan strategi adalah mengembangkan kearifan lokal dan lembaga adat yang terkait dengan kehidupan yang harmonis sehingga terwujud budaya umat beragama yang memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>7</sup>

### **Memahami Agama Lain.**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kuatnya semangat apologetik dilatar belakangi oleh besarnya semangat dakwah atau misi dikalangan kaum muslimin. Dakwah atau misi disini tidak semata-mata diartikan upaya meningkatkan taraf hidup manusia beragama, tapi juga menyampaikan ajaran agama yang diyakini kepada penganut agama lain. Dengan harapan penganut agama lain itu bersedia mengkompersi keyakinannya, tampah dialog yang jujur dan terbuka antar penganut agama dari segala lapisan masyarakat, maka apa yang diharapkan masih jauh dari harapan. Demikian pula selama ini perkembangan dialog antar agama dirasakan masih terbatas pada kalangan elit agama saja, itupun tidak seluruhnya. Masih banyak elit agama yang belum menyadari arti pentingnya dialog antar agama, apalagi melaksanakannya. Mereka tidak melihat agama lain sebagai sama derajat “ tanpa merasa rendah dan tampah merasa tinggi”. Sebaliknya justru memandangnya sebagai saingan

---

<sup>6</sup>Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, *Ulumul Quran, Dialog Agama-Agama, Ketegangan dan Toleransi*, Penerbit Bangkit, no 4. Vol. IV, thn. 1993.

<sup>7</sup>Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan umat Beragama*, Penerbit, PT. Saadah Cipta, Jakarta. 2012, hal. 188.

bahkan berniat mengajaknya “ menuju jalan keselamatan” seperti yang mereka anut.

Karena itu Parsudi Suprlan<sup>8</sup> mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia masih rentan terhadap konflik. Potensi disintegrasi sosial dihasilkan dari kompetisi individu dan kelompok pada berbagai bentuk “ sumber-sumber Sosial” yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan.

Saling mempengaruhi satu sama lain akan mempengaruhi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu.

Menyadari Indonesia sebagai bangsa pluralistik yang rentan terhadap potensi konflik sosial, pemerintah telah melaksanakan kebijakan etnisitas. R. William Liddle, mengatakan bahwa Pemerintah Orde Baru misalnya telah melakukan sejumlah kebijakan etnisitas sebagai upaya solusinya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang tergambar dalam bentuk peraturan perundangan yang disusun oleh otoritas pemerintahan seperti;

- a. Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2726 ).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- c. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/ BER/ MDN-MAG/1969 tentang Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.
- d. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/ 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/ Wakil Kepala daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

<sup>8</sup>Parsudi Suparlan, “ Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia”. Dalam *Konflik Komunal di Indonesia saat ini, Indonesia- Nederlands Cooperation in Islamic Studiengans* ( INIS) dan *The Center For Languages and Culture*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2003, hal. 70.

<sup>9</sup>R. William Liddle, “ Coercion, co- optation, and the Management of Ethnic Relation in Indonesia,” *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*, Editor; Michael E. Brown and Sumit Gnguly, CSIA Studies in International Security, the Mil Press Cambridge Mass Cambridge, Massachusetts, London, England, 1997, hal. 282-283.

## Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Masa pemerintah reformasi B.J. Habibie ( 1997-1999), kebijakan etnisitas lebih tampak pada bidang sosial budaya dan politik. Habibie memberi kesempatan etnis Cina untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendirikan partai politik dan diperkenankan untuk mempraktekkan adat istiadat dan budaya leluhur. Pemerintah Abdurrahman Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppress No. 6/ 2000, dan mencabut Inpres No.14/ 1967, tentang pelarangan praktik adat istiadat dan seni budaya Cina. Megawati Soekarnopoetri ( 2001-2004) memperkuat kembali legalitas praktik adat istiadat dan seni budaya Cina. Rezim Soesilo Bambang Yoedoyono (2004-2009) dan 2009-2014) lebih menfokuskan pada kejelasan tentang hubungan antaretnis ( UU PDRE) dan kerukunan umat beragama ( PBM-KUB No. 9 dan No. B/ 2006)<sup>10</sup>.

Dari uraian di atas kiranya kita dapat menarik kesimpulan bahwa paradigma keagamaan yang paling akomodatif sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah pencarian terhadap kehidupan umat beragama yang diinginkan di Indonesia adalah menekankan penghayatan agama yang sesuai ajaran yang dianutnya dengan mengedepankan pencarian dasar yang sama untuk saling menghormati antar pemeluk agama yang beragam. Ada banyak ajaran agama yang mencerminkan hal itu dalam kitab suci yang berbeda. Diantaranya;

- a. Islam; “ Aku ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar dapat saling kenal mengenal ( berinteraksi), sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. (AQ, Al Hujurat ayat 13). Dari sumber yang lain; “ Tidak seorangpun di antara kamu beriman sepanjang ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. ( hadist).
- b. Kristen;” Apa yang kamu ingin dari orang lain untuk lakukan padamu, lakukan juga pada mereka” ( Matius 7;2).
- c. Hindu; “ Siapapun tidak boleh memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak menyenangkan mereka sendiri, karena demikian esensi moralitas” ( Mahabharata XIII 114;8).
- d. Buddha;” Keadaan yang tidak menyenangkan bgiku akan juga demikian bagi dia, dan bagaimana saya bisa membebani orang lain dengan keadaan yang tidak menyenangkan saya?” ( Samyutta Nikaya V, 353,35-342,2).
- e. Khonghucu;” Apa yang kamu sendiri tidak inginkan, jangan kamu lakukan pada orang lain” ( Congpusius ).

---

<sup>10</sup>Lihat; ( Abdullah Idi “ *Bangka, Sejarah Sosial Cina dan Melayu...*”. *op.Cit.*, hal .216-217.

Artikulasi keberagaman seperti diatas akan terwujud dalam kehidupan umat beragama yang saling mengakui, saling menghormati dan bahkan saling bekerja sama antar penganut-penganut agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kejujuran intelektual merupakan kriteria penting dalam ilmu perbandingan agama. Selama ini kejujuran intelektual sering di abaikan. Sehingga para ahli ilmu perbandingan agama kadang mendistorsikan suatu agama tertentu dihadapan agama lain. Penyusutan agama ini merupakan sikap tidak adil terhadap agama itu sendiri. Kegencaran mengemban misi agama menjadi penyebab kelalaian yang tidak di sengaja.

Kiranya ilmu perbandingan agama akan selalu berada dalam situasi ketegangan antara dialog dan dakwa. Tetapi, dengan menyadari hal itu, maka keharmonisan hidup antar umat beragama dapat dibangun secara kreatif, tanpa perlu menghapus salah satu dari dua arah tersebut diatas.

Dengan demikian, pembinaan terhadap kerukunan hidup “ enam agama dalam satu rumah” yang selama ini sudah dicanangkan oleh pemerintah tetap terjaga

---